



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
UNIT KERJA : DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RAHMAN ANDA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 878532

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.217.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 190 m2/230 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 296.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/200 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 318.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/72 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 340.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2400 m2/2400 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, WARISAN Rp. 120.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 2860 m2/2860 m2 di KAB / KOTA BANYUWANGI, WARISAN Rp. 143.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 277.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 12.500.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA 2,4 MT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 29.983.451



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.544.983.451
III. HUTANG	Rp.	504.006.692
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.040.976.759

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.